

PERAN PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SEBAGAI WAHANA PENDIDIKAN POLITIK GUNA MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Arif Prasetyo Wibowo¹, Cecep Darmawan²

PPKn, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

PPKn, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung.

arifpwibowo@umm.ac.id

ABSTRAK

Partai politik memiliki peranan yang sangat menentukan dalam keberlangsungan system demokrasi modern dan merupakan pilar utama sistem politik nasional. Oleh karena itu pendidikan politik dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mengetahui fenomena yang terjadi dalam kehidupan partai politik sebagai proses demokratisasi di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini membahas mengenai makna pendidikan politik bagi Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat, hubungan platform partai terhadap nilai-nilai Pancasila, pendekatan, metode, dan media yang digunakan oleh partai dalam menumbuhkan nilai-nilai Pancasila kepada para kadernya. Adapun temuan dari penelitian ini, 1) pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kadernya merupakan proses sosialisasi politik yang di dalamnya merupakan upaya edukatif guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat. 2) Dalam hubungan platform partai dengan nilai-nilai Pancasila merupakan sebuah proses pendidikan politik yang di dalamnya para kader di berikan pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman baru dalam mentransformasikan nilai-nilai dan orientasi politiknya terhadap sistem ideal yang di harapkan. 3) Hambatan yang dihadapi adalah terdapatnya beberapa kader partai yang masih menganggap Pancasila sebagai *thogut*.

ABSTRACT

*Political parties have a very decisive role in the sustainability of the modern democratic system and are the main pillars of the national political system. Therefore political education can be an approach to find out the phenomena that occur in the life of political parties as a process of democratization in Indonesia. With a qualitative approach, this study discusses the meaning of political education for the West Java Prosperous Justice Party Regional Board, the relationship of the party's platform to the values of Pancasila, the approaches, methods and media used by parties in cultivating Pancasila values to their cadres. As for the findings of this study, 1) political education carried out by political parties to their cadres is a political socialization process in which it is an educational effort to improve the quality of human resources owned by the Regional Management Council of the West Java Prosperous Justice Party. 2) In relation to the party platform with the values of Pancasila, it is a political education process in which cadres are provided with new knowledge, understanding, and experiences in transforming their values and political orientation towards the expected ideal system. 3) The obstacle faced is the presence of several party cadres who still consider Pancasila as a *thogut*.*

Kata kunci:

Pendidikan Politik, Nilai-Nilai Pancasila, Partai Politik

Keywords:

Political Education, Pancasila Values, Political Parties

Pendahuluan

Negara-bangsa Indonesia di era modern telah mengalami pahit-getirnya gelombang sosial, seperti terjadi di penghujung kekuasaan Orde Lama dan Orde Baru, serta di awal Order Reformasi. Sebagai contoh, Pancasila mempunyai stigma karena sepak terjang rezim otoriter Orde Lama maupun Orde Baru. Orde Lama menggiring Pancasila pada ortodoksi ideologis Manipol-Usdek bahkan konsepsi simplistik Nasakom. Sementara orde baru memerosokkan pada jeram mistifikasi dan ideologisasi monologis Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4) dan asas tunggal. Sehingga Pancasila yang di awal kelahirannya secara eksistensial ibarat sebuah keajaiban yang maujud, kemudian di era Reformasi hampir dilupakan dan dianggap ideologi kalah, bahkan analog dengan rezim orde baru itu sendiri. Padahal Pancasila bukanlah milik sebuah rezim tertentu. Ia secara substansialis dirumuskan sebagai *Grundsnorm* bagi konsensus untuk merekatkan aneka ragam kelompok masyarakat kepulauan yang besar jumlahnya, berbeda-beda dan hidup di kawasan yang luas; untuk berdiri tegak di wilayah negara kesatuan bernama Indonesia: *the country of thousands impossibilities* (Soemantri, 2006).

Secara filosofis hakikat Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Oleh karena itu hakikat nilai sila-sila Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis manusia sebagai subjek pendukung pokok sila-sila Pancasila sekaligus sebagai pendukung pokok negara. Hal ini mendasarkan pada kenyataan objektif bahwa Pancasila dasar negara dan negara adalah organisasi (persekutuan hidup) manusia. Oleh karena itu negara dalam rangka mewujudkan tujuannya melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia “monopluralis”. Unsur-unsur hakikat manusia “monopluralis” meliputi susunan kodrat manusia, rokhani (jiwa) dan raga, sifat kodrat manusia makhluk individu dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena pembangunan nasional sebagai upaya praksis untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka pembangunan haruslah mendasarkan pada paradigma hakikat manusia “monopluralis” tersebut (Kaelan, 2002).

Di bidang politik, Alfian (1986) menjelaskan pembangunan dan pembaruan politik mengandung dua pengertian pokok yang saling berkaitan. Pengertian pertama ialah adanya suatu sistem ideal yang ingin dicapai. Kedua ialah penilaian bahwa sistem politik yang tengah berlaku masih mempunyai kelemahan-kelemahan, karena itu perlu diperbaiki atau diperbarui. Bagi masyarakat Indonesia yang majemuk ini sistem politik ideal yang di inginkan itu ialah Demokrasi Pancasila. Lebih lanjut Kaelan (2002) menjelaskan pembangunan dan pengembangan harus mendasarkan pada dasar ontologis manusia. Hal ini didasarkan pada kenyataan objektif bahwa manusia adalah sebagai subyek negara. Oleh karena itu kehidupan politik dalam negara harus benar-benar untuk merealisasikan tujuan demi harkat dan martabat manusia.

Namun demikian, terdapat beberapa masalah yang menghambat jalanya proses percepatan pembangunan nasional terlebih di bidang politik, diantaranya dibuktikan berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Kafid (2016) menjelaskan telah terjadi orientasi gerakan kelompok keagamaan islam beraliran radikal di era desentralisasi demokrasi, dari basis isu islamisme (penegakan syariat islam) ke arah “premanisme” (penguasaan sumber daya ekonomi) yang patut dijadikan perhatian bersama. Dalam hasil survei yang dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia Denny J.A. (Hidayat, 2018) pada tahun 2005 publik yang pro-Pancasila angkanya mencapai 85,2%, tahun 2010 menjadi 79,4%, tahun 2015 angkanya menjadi 79,4% dan di tahun 2018 menjadi 75,3%. Dalam waktu 13

tahun, publik yang pro-Pancasila mengalami penurunan sebanyak 10%. Sedangkan publik yang pro-NKRI bersyariah ialah mengalami kenaikan sebanyak 9% selama 13 tahun.

Lebih lanjut Manan dan Harijanti (2014) menjelaskan, sebagai *das sollen*, usaha-usaha menemukan stelsel dan mekanisme demokrasi yang cocok bagi masyarakat Indonesia sangatlah dihargai. Namun, pada tataran *das sein* bukanlah sesuatu yang mudah dijelmakan. Hal itu disebabkan: pertama, perpaduan-perpaduan konseptual ternyata tidak disertai dengan penjabaran mengenai *rule of the game* yang juga menggambarkan perpaduan tersebut. Selain itu, tingkah laku politik turut memberikan kontribusi yang serius. Akibatnya, para pelaku demokrasi “bebas” menciptakan *rule of the game* menurut paham dan pengetahuan yang memengaruhi diri mereka serta keinginan-keinginan politik yang hendak dicapai. Kedua, demokrasi merupakan suatu mekanisme yang tidak mudah dan kompleks baik secara kelembagaan maupun mekanismenya. Demokrasi memerlukan kesabaran dan pengalaman. Berbagai kegagalan demokrasi di masa lalu antaralain karena kurangnya kesabaran dan pengalaman berdemokrasi termasuk pemecahan persoalan secara demokratis.

Saputro (2015) dalam penelitiannya menjelaskan kehidupan berpolitik bangsa Indonesia yang diwakili oleh tata kelola partai politik masih jauh dari keadaan yang ideal. Pertama, partai politik yang menjadi salah satu pilar utama kehidupan berdemokrasi dan berpolitik masih harus terus berproses dalam menjalankan amanat sebagai penyalur aspirasi masyarakat. Kedua, Partai politik belum menjadikan pendidikan politik sebagai sorotan utama. Pendidikan politik seakan tenggelam di antara hiruk-pikuk perebutan kekuasaan. Irham (2016) menjelaskan eksklusivitas dalam rekrutmen dan seleksi kandidat merupakan modus korupsi demokratis yang kerap terjadi dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Sentralisme partai politik yang mengabaikan kontrol anggota partainya dan pertimbangan publik dalam rekrutmen calon kepala daerah telah menumbuhkan korupsi demokratis di kalangan kandidat dan elite partai politik.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wibowo (2020) kepada Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat menjadikan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai platform atau asas perjuangan partai, dengan jati diri kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan sosial serta watak gotong royong, demokratis, merdeka, pantang menyerah dan progresif revolusioner. Dalam proses pendidikan politik yang dilakukannya kepada para kader, dijelaskan secara keseluruhan proses panjang yang dijalani bangsa Indonesia dalam menemukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam kehidupan keorganisasiannya tidak pernah membedakan antara Pancasila 1 Juni 1945 dan Pancasila 18 Agustus 1945. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan hanya menjadikan Pancasila 1 Juni 1945 sebagai roh perjuangan partai sedangkan dalam praksisnya menjadikan Trisakti ajaran Bung Karno sebagai pedoman perjuangan program kerja partai.

Mengenai pendidikan politik yang seharusnya dilakukan oleh partai politik Mariana pengamat politik Universitas Padjadjaran (HUMAS UNPAD, 2011) menjelaskan partai politik sejatinya memiliki tugas lebih dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan partai politik telah menerima bantuan keuangan dari APBN/APBD sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, namun karena pemahaman mengenai pendidikan politik sangat lentur dan tidak adanya pertanggung-jawaban untuk substansinya maka efektifitas program tersebut belum teruji. Agar anggaran dari APBN/APBD ini efektif digunakan untuk pendidikan politik yang benar, sebaiknya pemerintah membuat pedoman dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan gubernur, atau peraturan walikota/bupati yang standarisasinya bisa dibuat oleh lembaga seperti Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat.

Dari penelitian tersebut dapat terlihat bagaimana sejatinya platform partai ternyata memberikan implikasi tersendiri dalam mengembangkan ideologi Pancasila. Sehingga partai politik seharusnya dapat menjadi wahana pendidikan politik dalam mensosialisasikan ideologi Negara yakni Pancasila. Sehingga dalam perkembangannya walaupun setiap partai politik memiliki platform partai sesuai dengan watak kekhasan dari setiap partai politik namun dapat terlihat keterkaitan platform partai yang dimilikinya dengan ideologi Pancasila.

Hal ini karena partai politik sejatinya memiliki peran yang menentukan dalam sebuah keberlangsungan sistem demokrasi modern dan merupakan pilar utama dalam kelembagaan sistem politik. Partai politik harus mampu menerjemahkan nilai dan kepentingan dalam suatu masyarakat dengan proses dari bawah ke atas, sehingga nilai dan kepentingan masyarakat tersebut menjadi rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat, dan program bagi rakyat dalam mempercepat proses terwujudnya cita-cita nasional. Diantara banyak fungsi demokratisasi yang menjadi kewajiban partai politik adalah memasyarakatkan, mendidik, serta menawarkan kepada anggota-anggotanya saluran mana yang efektif bagi partisipasi politik mereka (Meyer, 2012).

Oleh karena itu pendidikan politik dapat menjadi salah satu pendekatan untuk mengetahui fenomena yang terjadi dalam kehidupan partai politik sebagai proses demokratisasi di Indonesia. pendidikan politik atau sosialisasi politik merupakan proses penurunan nilai-nilai dan norma-norma dasar dari ideologi suatu negara yang dilakukan dengan sadar, terorganisir, dan berencana dan berlangsung kontinyu dari satu generasi kepada generasi berikutnya dalam rangka membangun watak bangsa. Nilai-nilai yang dimaksud adalah nilai-nilai ideologi dan konstitusi yang merupakan cerminan hati nurani dan sifat khas karakteristik bangsa. Nilai ini berasal dari kodrat budaya dan menjadi milik seluruh warga negara (Sunatra, 2016).

Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, sedangkan metode penelitian adalah deskriptif. Pemilihan pendekatan kualitatif dikarenakan pertama, permasalahan yang di kaji dalam penelitian ini di lakukan kepada Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat dengan membutuhkan sejumlah data lapangan yang sifatnya kontekstual dan aktual. Maksudnya adalah peneliti membutuhkan sejumlah data lapangan yang berisi masalah-masalah yang nyata terjadi di lapangan dan mencari solusi dalam memecahkan masalah tersebut. Kedua, pendekatan kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, dalam pendekatan kualitatif yang menjadi instrumen utama adalah peneliti itu sendiri, maka pendekatan kualitatif tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, pendekatan kualitatif memiliki sifat fleksibilitas yang tinggi, artinya memudahkan peneliti untuk menyesuaikan situasi yang berubah-ubah dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Secara kajian teoritis teori peran dijelaskan oleh Biddle dan Thomas (dalam Wibowo et al., 2020) dapat menggambarkan peran seorang aktor sesungguhnya berada dalam suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam “penampilan/ unjuk peran” (*role performance*). Hubungan antara pelaku (*actor*) dan pasangan laku perannya (*role partner*) bersifat saling terkait dan saling mengisi; karena dalam konteks sosial, tak satu peran pun dapat berdiri sendiri tanpa yang lain. Dengan ungkapan lain, suatu peran akan memenuhi keberadaanya, jika berada dalam kaitan posisional yang menyertakan dua pelaku peran yang komplementer.

Berdasarkan hasil temuan di lapangan pendidikan politik yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Jawa Barat (DPW PKS JABAR) kepada para kadernya merupakan suatu kegiatan edukatif yang dilakukan oleh partai untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman para kader terhadap orientasi nilai-nilai perjuangan dari partai politik. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik secara sistematis, berjenjang, dan berkesinambungan. DPW PKS JABAR melakukan enam jenjang administrasi pendidikan politik yang harus di ikuti oleh para kader, yaitu kaderisasi anggota pemula dan kaderisasi anggota muda, kaderisasi anggota madya, kaderisasi anggota dewasa, kaderisasi anggota ahli, dan yang terakhir adalah kaderisasi anggota purna.

Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kadernya tersebut, menurut Ruslan (2000) menjelaskan pendidikan politik adalah bagian dari pendidikan sosial pada umumnya. Ia adalah kegiatan yang dengan melakukannya orang akan memperoleh berbagai pengalaman, pengetahuan, nilai, orientasi, dan kesiapan untuk ikut berpartisipasi—dengan tingkat aktivitas yang berbeda-beda—sebagai anggota dalam sebuah komunitas sosial atau masyarakat. Sehingga kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kadernya tersebut Kartono (2009) dapat dikatakan merupakan upaya edukatif yang intensional, disengaja, dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik, dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis/ moral mencapai tujuan-tujuan politik.

Dalam proses pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kadernya tersebut, setiap partai politik memberikan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda-beda dalam setiap jenjang kaderisasi. Namun dengan tujuan akhir yang sama, yakni peningkatan sumber daya manusia yang berkarakter sesuai dengan watak dari partainya. Kegiatan pendidikan politik yang dilakukan secara rutin baik dalam pertemuan tiap minggu yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat, atau secara periodik setahun sekali yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Jawa Barat merupakan bentuk upaya partai dalam melakukan perubahan cara berpikir dan peningkatan partisipasi kader dalam kegiatan politik yang dilakukan oleh partai.

Dari kegiatan pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik tersebut, para kader merasa mendapatkan kesadaran dan pemahaman baru mengenai arti penting berkontribusi dalam kegiatan politik. Sehingga dalam pelaksanaan praksis para kader mengerti dan memahami apa saja yang perlu dan harus dilakukan dalam berkontribusi serta terlibat aktif di kegiatan politik. Kontribusi aktif yang dilakukan para kader dalam kegiatan politik tersebut di maknai sebagai bekal utama untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik, sehingga para kader dapat mensosialisasikan kembali nilai-nilai yang diduplikasinya dalam proses pendidikan politik yang diperolehnya dalam kaderisasi partai kepada hal layak ramai.

Paparan temuan tersebut menurut Alfian (1986b) dapat dikatakan pendidikan politik dalam arti ketat, yaitu sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka menghayati dan memahami betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Sedangkan proses sosialisasi yang dilakukan oleh kader kepada masyarakat yang lebih umum dalam kontribusinya melakukan perubahan terhadap nilai-nilai yang dianggapnya ideal tadi menurut (Alfian, 1986b) merupakan pendidikan politik dalam arti kata yang longgar, yaitu bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari. disenangi atau tidak, diketahui atau tidak, disadari atau tidak, hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat, baik penguasa ataupun orang awam.

Dari pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik tersebut berfungsi untuk memperbaiki sistem yang berlaku agar segera tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai

dengan visi misi yang di miliki setiap partai. Hal ini dapat di lihat dari hasil temuan di lapangan Dewan Pengurus Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat dalam pendidikan politik yang dilakukannya memiliki fungsi sebagai berikut: pertama, penyebaran kader aktivis dakwah ke berbagai kalangan dan lapisan masyarakat agar menerima manhaj islam serta produk kebijakan publik yang islami. Kedua, penyebaran kader ke berbagai lembaga yang membuat kebijakan publik agar dapat mempengaruhi, merumuskan, serta menerjemahkan konsep dan nilai-nilai islam kedalam kebijakan-kebijakan publik.

Pendidikan politik dapat berkembang melalui lembaga formal dan informal, misalnya keluarga, sekolah, partai-partai politik, media massa. Berdirinya partai-partai politik dalam suatu masyarakat merupakan media pendidikan politik yang sesungguhnya. Peran partai politik menjadi lebih besar dari pada sebagai alat pemilihan umum yang di karenakan ikut menentukan serta mengartikulasikan sikap politik bagi sekelompok masyarakat yang berdampak kepada sistem politik di suatu negara, hal inilah yang membuat peran partai politik menjadi besar pengaruhnya dalam pendidikan politik (Ruslan, 2000). Melalui pendidikan politik yang dilakukan oleh berbagai lembaga formal dan informal tersebut warga negara diberikan pemahaman untuk mengubah realitas politik kedalam sistem politik yang ideal menurut arah pembangunan bangsanya, yang dapat di tandai dengan kebudayaan politik baru. Bila warga negara memiliki pemahaman mengenai nilai-nilai politik, maka dengan sendirinya akan memotivasi warga negara tersebut untuk ikut aktif berpartisipasi ke dalam politik (Soeprapto et al., 2014).

Partai Keadilan Sejahtera menjadikan islam sebagai asas perjuangan partai, dengan tujuan terwujudnya masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridlai Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setyadarmodjo (2000) ideologi partai politik tersebut ialah ide mengenai masyarakat dan negara ini disusun, pemerintahan yang bagaimana yang akan diselenggarakan, dan yang diperjuangkan terus menerus oleh organisasi yang dinamakan partai politik itu. Lebih lanjut Surbakti (2007) menjabarkan ideologi yang dimaksud ialah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara konkret dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya di awasi secara ketat oleh aparat partai. Pergantian kepemimpinan mengubah gaya kepemimpinan pada tingkat tertentu, tetapi tidak mengubah prinsip dan program dasar partai karena ideologi partai sudah dirumuskan secara konkret dan partai ini terorganisasikan secara ketat.

Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat meskipun menggunakan islam sebagai asas perjuangan, namun tetap mengakui Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, dengan anggapan umat islam dalam pergulatan sejarah mendirikan negara Indonesia ini turut andil dan berkontribusi besar pada momentum ketika itu. Dalam proses pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera hal tersebut juga di sosialisasikan kembali untuk memberikan pemahaman guna meningkatkan kesadaran serta wawasan kebangsaan para kader. Selain memberikan wawasan kebangsaan kepada para kader, Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat juga sering melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian dan juga Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan materi tambahan terkait wawasan kebangsaan.

Namun berdasarkan hasil temuan di lapangan, Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat mengakui terdapat beberapa kelompok dari kader Partai Keadilan Sejahtera yang tidak mengakui Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Hal ini di pengaruhi oleh sejarah Partai Keadilan sebelum menjadi Partai Keadilan Sejahtera yang sekarang. Para kelompok-kelompok kecil tersebut menyebut Pancasila dengan istilah "thogut" yang memiliki arti menyembah

tuhan selain Allah. Bahkan Partai Keadilan Sejahtera sendiri semenjak memasukan Pancasila kedalam AD/ ART partai di sebut oleh kelompok tersebut sebagai partai thogut.

Setiap platform yang dimiliki oleh setiap partai politik tersebut menurut Soedarso (2006) merupakan sebuah usaha berpikir secara rasional (bernalar), sistematis (runtut), radikal (mendalam), komprehensif (menyeluruh), dan universal (objektif/ intersubjektif) tentang segala sesuatu. Platform yang dimiliki oleh partai politik tersebut merupakan pondasi awal dalam membentuk sistem kehidupan kepartaian yang dimilikinya, sebab Susanto (2013) sistem tersebut merupakan kumpulan dari sub-sistem/ bagian/ komponen apapun baik fisik ataupun non-fisik yang saling berhubungan satu sama lain dan bekerjasama secara harmonis untuk mencapai satu tujuan tertentu.

Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat sejak awal di dirikannya mengusung jargon sebagai partai dakwah. Dakwah merupakan pendekatan yang dilakukan oleh Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa Barat dalam proses pendidikan politik yang dilakukannya. Sehingga Dewan Pengurus Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Jawa barat dapat mengelompokkan bagian-bagian dari keanggotaan partainya dengan jelas, yakni masyarakat umum, simpatisan, dan kader Partai Keadilan Sejahtera. Gerakan dakwah ini dibagi menjadi dua, yaitu gerakan dakwah kultural dan gerakan dakwah struktural. Gerakan dakwah kultural merupakan penyebaran aktifis dakwah keberbagai kalangan serta lapisan masyarakat dengan tujuan mempersiapkan masyarakat untuk menerima manhaj islam sebagai produk kebijakan publik. Sedangkan gerakan struktural adalah penyebaran kader dakwah ke berbagai lembaga yang menjadi sumber-sumber kebijakan publik, dengan tujuan agar para kader tersebut dapat mempengaruhi, merumuskan, serta menerjemahkan konsep kebijakan publik dengan nilai-nilai keislaman.

Dari pendekatan yang dilakukan oleh partai politik dalam melakukan rekrutmen partai dapat dikatakan sebagai kelompok pertama yang melakukan penyadaran, hal ini menurut Verba (dalam Berger, 1997) *the primary group (small, face-toface group), by fostering group consciousness (shared opinions, attitudes, values), has a powerful influence on the individual. The primary group is instrumental in the mobilization of political behavior because such groups are the locus of political decision making in an organization as well as the transmission points for political communications.*

Simpulan

Secara umum pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kadernya merupakan proses sosialisasi politik yang di dalamnya merupakan upaya edukatif guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh partai politik. Dalam proses pendidikan politik tersebut para kader di berikan pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman baru dalam mentransformasikan nilai-nilai dan orientasi politiknya terhadap sistem ideal yang di harapkan. Sehingga dalam praksisnya setiap kader memiliki tugas yang berbeda-beda sesuai dengan latar belakang yang dimilikinya guna berkontribusi serta berpartisipasi aktif dalam medan perjuangan politik.

Dalam proses pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kadernya, sangat kental nuansa nilai-nilai perjuangan yang dimiliki oleh tiap partai politik dalam mewujudkan sistem ideal yang di kehendaknya. Asas atau platform yang dimiliki oleh setiap partai memiliki pandangan sendiri-sendiri mengenai sistem apa yang hendak dicapai dalam medan perjuangan politik, dan hal tersebutlah yang di berikan kepada para kader.

Makna pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kader merupakan suatu kegiatan edukatif yang dilakukan oleh partai untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman para kader terhadap orientasi nilai-nilai perjuangan dari partai politik. Hal ini dapat dilihat dari pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik secara sistematis, berjenjang, dan berkesinambungan. Dalam proses pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada para kadernya tersebut, setiap partai politik memberikan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang berbeda-beda dalam setiap jenjang kaderisasi. Namun dengan tujuan akhir yang sama, yakni peningkatan sumber daya kader yang berkarakter sesuai dengan watak dari partainya masing-masing.

Proses pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik memiliki platformnya masing-masing, namun dalam AD/ ART setiap partai politik mendudukkan Pancasila sebagai tujuan akhir dalam pembentukan partai politik, yakni mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Platform partai politik mempengaruhi dengan cara apa dan bagaimana proses perwujudan cita-cita nasional tersebut dapat terwujud; Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan melakukannya dengan cara Trisakti ajaran Bung Karno yakni berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sedangkan Partai Keadilan Sejahtera melakukannya dengan dakwah, pendidikan, ekonomi, dan sosial-kemasyarakatan dalam mewujudkan masyarakat madani yang di ridlai Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Referensi

- Alfian. (1986a). Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia Kumpulan Karangan. Gramedia Pustaka Utama.
- Alfian. (1986b). Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia Kumpulan Karangan. Gramedia Pustaka Utama.
- Berger, K. J. (1997). The Political Behavior Of California Community College Nursing Faculties In Response To Budget Cutbacks, 1982-1987. University of San Diego.
- Hidayat, F. (2018). Survei LSI: Pro-Pancasila Turun 10%, Pro-NKRI Bersyariah Naik 9%. Www.Detik.Com. <https://news.detik.com/berita/d-4119173/survei-lsi-pro-pancasila-turun-10-pro-nkri-bersyariah-naik-9>
- HUMAS UNPAD. (2011, August). Buat Standar Pendidikan Politik! Pikiran Rakyat, 2.
- Irham, M. A. (2016). Korupsi Demokratis dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilukada Lampung. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 7(1), 63–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.4799>
- Kaelan. (2002). Pendidikan Pancasila. Paradigma.
- Kafid, N. (2016). Dari Islamisme ke “Premanisme”: Pergeseran Orientasi Gerakan Kelompok Islam Radikal di Era Desentralisasi Demokrasi. MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi, 21(1), 57–79. <https://doi.org/https://doi.org/10.7454/mjs.v21i1.4737>
- Kartono, K. (2009). Pendidikan Politik Sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa. Mandar Maju.
- Manan, B., & Harijanti, S. D. (2014). Artikel Kehormatan: Saat Rakyat Bicara: Demokrasi dan Kesejahteraan. Pandjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, 1(1), 1–18. <https://doi.org/https://doi.org/10.22304/pjih.v1n1.a1>

- Meyer, T. (2012). Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis. Friedrich Ebert Stiftung. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/09836.pdf>
- Ruslan, U. A. M. (2000). Tarbiyah Siyasiyah Pendidikan Politik Ikhwanul Muslimin. Era Intermedia.
- Saputro, Y. D. (2015). Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda Dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Di DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009 - 2014). *Jurnal Ketahanan Nasional*, XXI(1), 34–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.22146/jkn.6892>
- Setyadarmodjo, S. H. (2000). Organisasi Partai Politik Dan Demokrasi. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan, Dan Politik*, 8(1), 87–94. <http://www.journal.unair.ac.id/download-fullpapers-09-soenarko.pdf>
- Soedarso. (2006). Pengembangan Sistem Filsafat Pancasila. *Jurnal Filsafat*, 39(1), 42–56. <https://doi.org/10.22146/jf.23215>
- Soemantri, G. S. (2006). Pancasila dalam Perubahan Sosial-Politik Indonesia Modern. In I. Nasution & R. Agustinus (Eds.), *Prosiding Simposium Peringatan Hari Lahirnya Pancasila “Restorasi Pancasila: Mendamaikan Politik Identitas dan Modernitas”* (pp. 1–32). FISIP UI, Perhimpunan Pendidikan Demokrasi, Brighten Institute, Kelompok TEMPO Media.
- Soeprapto, A., Susilasti, D., & Suparno, B. A. (2014). Komunikasi Dalam Proses Pendidikan Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 12(1), 39–54.
- Sunatra. (2016). Pendidikan Politik Kewarganegaraan. LEKKAS.
- Surbakti, R. (2007). Memahami Ilmu Politik. PT. Grasindo.
- Susanto, A. (2013). Sistem Informasi Akutansi. Lingga Jaya.
- Wibowo, A. P. (2020). THE EFFORTS OF DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PARTY REGIONAL BOARD STRUGGLE IN TRANSFORMATION PANCASILA VALUES ON CADRE. *JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*, 5(1), 33–41. <http://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/view/12673/6096>
- Wibowo, A. P., Djuyandi, Y., & Agustino, L. (2020). PERAN ORGANISASI GERAKAN MAHASISWA NASIONAL INDONESIA DALAM MENTRANSFORMASIKAN NILAI-NILAI PANCASILA DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 191–204. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jch.v5i2.13237>